

## RINGKASAN BERITA HARI INI

### KOMUNITAS BOLONE MAK MIMIK RAMAIKAN UMKM GADING FAJAR

Sidoarjo, Pajok Kiri  
H. Mimik Idayana anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra juga sebagai Cawabup yang berprestasi Dengan H. Subandi Sabu Sore (25%) menyapa Emak-Emak dalam acara ngopi bareng duduk bersama yang tergarang di dalam Komunitas Bolone Mak Mimik di daerah Gading Fajar II.



Dalam keterangannya H. Mimik mengungkapkan, kegiatan ngopi bersama saling menginspirasi produk olahan mereka, menyerap aspirasi mereka. Ternyata banyak keluhan dari mereka yang diutarakan kepada saya terkait UMKM," ungkapnya.

ngopi bersama saling menginspirasi produk olahan mereka, menyerap aspirasi mereka. Ternyata banyak keluhan dari mereka yang diutarakan kepada saya terkait UMKM," ungkapnya.

### Mulai Juni, Upah Pekerja Dipotong 2,5 Persen



Pemerintah ini senengnya ngumpul duit rakyat. Terus dari duit itu, digoreng-goreng dalam berbagai instrumen investasi."

- Untuk iuran Tabungan Perumahan, Dikembalikan ketika Pensiun
- Tanggung Pungutan 18-19 Persen, Asosiasi Pengusaha Keberatan

JAKARTA - Para pegawai swasta harus siap menanggung potongan gaji lebih besar. Pasalnya, pemerintah mewajibkan potong-

an 3 persen dari gaji pekerja setiap bulan untuk iuran program tabungan perumahan rakyat (tapera) = Baca Mulai... Hal 11

### Sat Lantas Polresta Sidoarjo Bagi-bagi Paket Sembako



Polantas Sidoarjo berbagi sembako.

Sidoarjo, Memorandum Peduli pada masyarakat, terutama bagi pengendara yang tertib berlalu lintas, dilakukan personel Sat Lantas Polresta Sidoarjo.

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78. 1 Juli akan dilantik III Regident Sat Lantas Polresta Sidoarjo Iptu Moneta Lestari, pembagian 78 paket sembako ini dalam rangka menghormati peringatan Hari Bhayangkara.

### Plt Bupati Subandi Gandeng Nasyyatul Aisyiyah Bangun Sidoarjo

KOTA-Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH, M.Kn, menghadiri pengukuhan PC Nasyyatul Aisyiyah se-kabupaten Sidoarjo dan Konsolidasi Daerah, Minggu (26/5) di kompleks Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.



SIBERGO: Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri pengukuhan PC Nasyyatul Aisyiyah se-Sidoarjo.

"Kami sangat menyambut baik dengan hadirnya organisasi-organisasi semacam ini. Apalagi di bawah naungan para ulama dan umaro, akan menjadikan kekuatan bagi Pemkab Sidoarjo dalam memajukan kondisi sendi kehidupan bangsa dan bernegara," ucapnya.

### Hari Pertama Verifikasi Offline, Calon Siswa Membludak

SIDOARJO - Kemarin (28/5) menjadi hari pertama verifikasi berkas penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN SMK dan pengambalian PIN (personal identification number) untuk pendaftaran. Calon siswa yang datang ke sekolah membludak.



ANTUSAS: Bilian Narendra dari SMPN 6 ditempuh ibunya, Ika Puj, saat verifikasi PPDB di SMAN 1 Sidoarjo kemarin.

Kepala SMAN 1 Sidoarjo Eko Redjo Sunariyanto mengatakan, kemarin calon siswa mulai melakukan verifikasi berkas secara langsung ke sekolah. Hari sebelumnya, mereka telah mengajukan PIN secara online dan mengunggah dokumen. Setelah itu, mereka mendapat pemberitahuan untuk verifikasi secara offline di lima sekolah yang ditentukan.

### KPU Umumkan Pemenang Lomba Maskot dan Jingle Hari Ini

KOTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak semakin dekat. KPU Sidoarjo sudah melakukan persiapan untuk memajukan pelaran lima tahun tersebut.



Karena mereka yang lebih tahu bagus tidaknya karya dan peserta.

### PPS Resmi Dilantik Songsong Pilkada 2024

Sidoarjo, Pajok Kiri  
KPU Sidoarjo siapkan Pilkada 2024 dengan melantik dan mengambil sumpah anggota Panitia Pengungutan Suara (PPS), Minggu (26/5) di Mal Perayaan Publik Sidoarjo, Pelantikan PPS tersebut saksikan langsung oleh Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M.Kn.



"Setelah dilantik anggota PPS segera berkoordinasi dengan kepala desa/lurah setempat. Segera koordinasikan dengan baik fasilitas apa saja yang dapat digunakan oleh PPS dalam melaksanakan tugas," jelas Subandi pada saat memberikan sambutan pelantikan PPS Sidoarjo.

**POTONGAN RUTIN PEKERJA FORMAL**

**1. KEMERDEKAAN**

- Pemberi kerja: 4 persen dari gaji
- Pekerja: 0,3 persen dari gaji

**2. BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)**

- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)
  - Pemberi kerja: 3,7 persen dari gaji
  - Pekerja: 2 persen dari gaji
- Iuran Jaminan Pensiun (JP)
  - Pemberi kerja: 2 persen dari gaji
  - Pekerja: 1 persen dari gaji
- Iuran Jaminan Kematian (JKM)
  - Pemberi kerja: 0,3 persen dari gaji
  - Pekerja: 0,3 persen dari gaji
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - Pemberi kerja: 0,2 persen dari gaji
  - Pekerja: 0,24 persen dari gaji
- Tapera (akan berjalan 2027)
  - Pemberi kerja: 0,5 persen dari gaji
  - Pekerja: 2,5 persen dari gaji

**PERSENTASE KURANGAN RUMAH (BACKLOG) DI INDONESIA**

Tahun	2023	2022	2021	2020
9,9 juta unit	10,51 juta unit	12,72 juta unit	12,75 juta unit	

Sumber: Sensus BPS Maret 2023

### DPR: Kebijakan Jangan Memeratakan Masyarakat

RO dan kontra kebijakan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan pemerintah untuk memintakan penolakan terkait na-

ke gedung parlemen. DPR bakal memanggil pemerintah untuk memintakan penolakan terkait na-

### UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO 2024



KPU Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

# Mulai Juni, Upah Pekerja Dipotong 2,5 Persen



Pemerintah ini  
*senengnya ngumpulin*  
duit rakyat. Terus dari  
duit itu, digoreng-  
goreng dalam  
berbagai instrumen  
investasi.”

**JUMHUR HIDAYAT**  
Ketua Umum DPP KSPSI



Pemerintah  
diharapkan dapat  
lebih mengoptimalkan  
dana BPJS Ketenagakerjaan. Dana  
MIT yang tersedia  
sangat besar dan  
sangat sedikit

- Untuk Iuran Tabungan Perumahan, Dikembalikan ketika Pensiun
- Tanggung Pungutan 18-19 Persen, Asosiasi Pengusaha Keberatan

**JAKARTA** - Para pegawai swasta harus bersiap menanggung potongan gaji lebih besar. Pasalnya, pemerintah mewajibkan potong-

an 3 persen dari gaji pekerja setiap bulan untuk iuran program tabungan perumahan rakyat (tapera) ■

*Baca Mulai... Hal 11*

## POTONGAN RUTIN PEKERJA FORMAL

### 1 BPJS Kesehatan

- Pemberi kerja: 4 persen dari gaji
- Pekerja : 1 persen dari gaji

### 2 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)

- Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)
- Pemberi kerja: 3,7 persen dari gaji
- Pekerja : 2 persen dari gaji

- Iuran Jaminan Pensiun (JP)
- Pemberi kerja: 2 persen dari gaji
- Pekerja : 1 persen dari gaji

Sumber: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera

### Iuran Jaminan Kematian (JKM)

- Pemberi kerja: 0
- Pekerja : 0,3 persen

### Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Pemberi kerja: 0
- Pekerja : 0,24 persen dari gaji

### 3 Tapera (akan berjalan 2027)

- Pemberi kerja: 0,5 persen dari gaji
- Pekerja : 2,5 persen dari gaji

## PERSENTASE KEKURANGAN RUMAH (BACKLOG) DI INDONESIA

9,9 juta    10,51 juta    12,72 juta    12,75 juta

...sangat sekali pemanfaatannya."

**SHINTA WIDJAJA KAMDANI**  
Ketua Umum Apindo



GRAFIS HERLABANG/JAWA POS

# DPR: Kebijakan Jangan Memberatkan Masyarakat

**PRO dan kontra kebijakan potongan gaji untuk tabungan perumahan ke gedung parlemen. DPR bakal memanggil pemerintah untuk meminta rancangan PP 21/2024 tentang perubahan atas PP 25/2020 tentang Tapera ■**

Rasa DDB Hal 11

## Jawa Pos

## Mulai Juni, Upah Pekerja Dipotong 2,5 Persen

Sumbangan dari hal 1

Iuran masuk ke rekening dana tapera paling lambat tanggal 10 tiap bulan.

Aturan itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Beleid itu berlaku sejak ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Komisiner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, beleid itu merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya. Heru menggarisbawahi, dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta. "Dana yang dikembalikan kepada peserta tapera ketika masa kepesertaannya berakhir berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya," jelas dia di Jakarta kemarin (28/5).

Masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan tapera. "Sepanjang telah menjadi peserta tapera," imbuhnya.

Dalam pengelolaan dana tapera, BP Tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip *good corporate governance* (GCG). Juga mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Dalam pasal 15 beleid itu disebutkan, potongan tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji yang diterima per bulan. Perinciannya, 0,5

persen dibayarkan pemberi kerja dan 2,5 persen dibayarkan pekerja. Merujuk berlakunya PP 21/2024, kewajiban iuran tapera tersebut bisa dimulai Juni 2024.

Pada aturan itu disebutkan, peserta dana tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Pekerja mandiri berarti karyawan dengan penghasilan di bawah upah minimum atau *freelancer*.

Berdasar Pasal 68 PP 25/2020 dijelaskan, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut. Artinya, pendaftaran kepesertaan dana tapera wajib dilakukan paling lambat 2027.

**Sikap Buruh dan Pengusaha**  
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat khawatir tapera menjadi bancakan

dengan modus investasi dari penggalangan uang masyarakat. Praktik seperti itu sebelumnya terjadi pada Jiwasraya dan ASABRI. "Pemerintah ini *senengnya ngumpul*in duit rakyat. Terus dari duit itu, digoreng-goreng dalam berbagai instrumen investasi," katanya.

Jumhur mengungkapkan, masih belum hilang ingatan publik terhadap megakorupsi di tubuh Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,807 triliun. Kemudian, nilai kerugian negara pada kasus ASABRI mencapai Rp 22 triliun.

Menurut Jumhur, iuran tapera memang terlihat kecil. Hanya 2,5 persen dari upah buruh dan 0,5 persen dari pemberi kerja. Tetapi, jika diakumulasi dengan seluruh angkatan kerja yang ada, akan terhimpun dana jumbo untuk dikelola pemerintah.

Menurut Jumhur, saat ini potongan untuk buruh sudah banyak sekali. Mulai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga asuransi

lainnya atau tabungan pensiun dari masing-masing kantor. Jika pemerintah punya niat baik supaya rakyat punya rumah dengan mudah, banyak cara yang bisa dilakukan. Misalnya dengan pengadaan tanah yang murah, subsidi bunga seperti skema FLPP saat ini, atau skema pembelian rumah tanpa uang muka.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga dengan tegas menolak PP 21/2024. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menegaskan, sejak awal munculnya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pihaknya sudah menyampaikan penolakan. "Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada presiden mengenai tapera. Sejalan dengan Apindo, serikat buruh atau pekerja juga menolak pemberlakuan program tapera. Program tapera dinilai memberatkan beban iuran, baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja atau

buruh," cetus Shinta kemarin.

Pada dasarnya, Apindo mendukung kesejahteraan pekerja dengan adanya ketersediaan perumahan bagi mereka. Namun, PP 21/2024 dinilai duplikasi dengan program sebelumnya, yaitu manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua (JHT) BPJS SOSTEK. Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sangat sedikit pemanfaatannya," ungkap Shinta.

Apindo menilai aturan tapera yang terbaru dinilai makin menambah beban baru, baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Saat ini beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24 persen sampai 19,74 persen dari penghasilan pekerja. "Beban ini makin berat dengan adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar," ujarnya.

Shinta berpendapat, tapera

sebaiknya diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri. "Jika pemerintah tetap akan menerapkannya, diharapkan dimulai dulu dengan dan yang terkumpul dari ASN, TNI, dan Polri untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah. Jika hasil evaluasi sudah bagus pengelolannya, baru dikaji untuk perluas cakupannya ke sektor swasta," tuturnya.

Terkait pro dan kontra tapera, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan: iuran tapera merupakan tabungan peserta atau pekerja dalam jangka waktu tertentu. Dana tersebut di himpun dan digunakan untuk pembiayaan perumahan layak dan terjangkau.

"Ini bukan uang hilang. Ada jaminan hari tua," tuturnya. Namun, Basuki belum bisa bicara detail ihwa kebijakan mulai dijalankan untuk semua, termasuk pegawai swasta. (dee/wan agf/ldr/c9/fal)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Sosialisasi implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013.

LOEPR/DUTA

## Perda No. 10 Tahun 2013 Jaga Ketertiban dan Ketentraman

**SIDOARJO** - Dalam upaya memperkuat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi yang menekankan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Program TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo di Balai Desa Penambangan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, Selasa (28/5/24).

Sosialisasi ini menyoroti peran penting Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kapten Inf. Hendro Danramil 0816/10 Balongbendo turut memperkuat arahan terse-

but dengan penekanan pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat.

Bapak Edi Sulaksono dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turut memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi Perda tersebut berdampak pada kebersihan lingkungan, sebagai bagian integral dari menciptakan ketertiban umum.

Selain itu, AKP Drs. Samsudin dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai kepala penyuluh Narkoba, menyampaikan pentingnya peran bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba demi menjaga ketentraman masyarakat.

"Kegiatan sosialisasi ini menjadi

momentum penting dalam memperkuat pemahaman kita akan peraturan-peraturan yang telah ada, khususnya Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat bersinergi dengan aparat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua," ungkap Kapten Inf Hendro.

Acara dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan aparat terkait dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus merangsang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan daerah. ● **Loe**

**DUTA**

## Turunkan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak

Diperoleh oleh Sulbag Pers dengan Risaah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

**SIDOARJO** - TP.PKK Kabupaten Sidoarjo turut berpartisipasi aktif menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) dan Polresta Sidoarjo untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, kader-kader PKK tentang keluarga Indonesia anti kekerasan dan pelecehan seksual, Selasa (28/5/24) di Pendopo Delta Wibawa.

Pit. Ketua PKK Kabupaten Sidoarjo dr. Sriatun Subandi memberikan apresiasi positif terhadap sosialisasi keluarga Indonesia anti kekerasan dan pelecehan seksual untuk kader PKK. Karena PKK itu kekuatan perempuan ditingkat dasar dalam membangun pondasi keluarga, melalui berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

"Semoga dengan kegiatan ini TP.PKK akan terus bersinergi dengan Dinas P3AKB, Polresta Sidoarjo, terkait dengan penurunan kekerasan perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Kita akan bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo," jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus KDRT maupun kekerasan

seksual yang terjadi baik pada perempuan dan anak bukannya dengan payung hukum bagi korban dan pelaku. Penguatan peran keluarga juga penting. Mengingat keluarga sebagai pondasi utama dalam menjaga dan melindungi dari perilaku kekerasan seksual.

"Jika sebuah keluarga memiliki ketahanan keluarga yang baik, maka dengan sendirinya akan tercipta tatanan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai yang sesuai dengan aturan norma agama. Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam memajukan dan mengokohkan bangsa dan negara,"katanya

Lebih lanjut Sriatun mengatakan ketahanan keluarga yang kuat dan kokoh juga harus dibangun dengan aspek ketahanan spiritual, psikologis dan ketahanan sosial. Untuk TP.PKK Kabupaten Sidoarjo yang membidangi bidang tersebut ada di Pokja I.

Kegiatan Sosialisasi ini diikuti oleh Pengurus TP.PKK Kabupaten, perwakilan pengurus TP.PKK Kecamatan, dan Kelurahan/ desa se-Kabupaten Sidoarjo. Narasumber Heni Kristiani SPd., M.Pd. Kepala Dinas P3AKB Kab.Sidoarjo serta Utun Utami SH, yang merupakan Kanit PP/ Polresta Sidoarjo. ● Loe



LOKAL DUTA

TPIPK Kab Sidoarjo sosialisasi dan edukasi anti kekerasan pelecehan seksual Selasa (28/5/24) di Pendopo Duta Wibawa(T)

**DUTA**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Pembangunan ruang perangkat mencapai progres 70 persen.

## Pemdes Tenggulunan Bangun Ruang Perangkat Desa dan Ruang BPD

**Sidoarjo, Pojok Kiri**

Pemerintah Desa (Pemdes) Tenggulunan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, melakukan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang nyaman untuk masyarakat yang berkunjung ke kantor Desa dengan pembangunan gedung baru dengan luas 3x9 m ditambah dengan pemasangan kanopy 4x9 m rencananya ruang tersebut akan digunakan perangkat desa maupun BPD berlokasi tepatnya dibelakang Kantor Balai Desa Tenggulunan. Pembangunan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp. 100.000.000, belum termasuk Ppn+Pph pembangunan tersebut anggaranya bersum-

ber dari APBDes 1A.2024.

H.Ahmad Idom Maun Kades Tenggulunan saat dikonfirmasi awak media Koran Pojok Kiri, Selasa (28/5/2024) mengatakan, "Alhamdulillah, pembangunan ini berjalan dengan lancar sesuai target waktu yang ditentukan. Kami melaksanakan pembangunan ini, untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun kenyamanan bagi perangkat Desa yang selama ini belum maksimal karena ruang kantor yang sebelumnya kurang reseprentatif," ujar Idom.

Pemerintah Desa ingin memberikan pelayanan yang Prima dan maksimal baik untuk masyarakat Desa maupun perangkat desa yang melayani. Ini semua, bisa membawa kemajuan dan semangat bersama tutur, Idom salah satu Kades Se kecamatan Candi yang mendapat perpanjangan 2 tahun memimpin Desa Tenggulunan.

Lanjut Idom, "dengan status Desa Tenggulunan termasuk Desa Mandiri kedepanya akan lebih maju dibandingkan sebelumnya. Semoga dengan adanya penambahan ruang perangkat bisa bermanfaat dan kemajuan untuk desa dan masyarakatnya. Saya juga ingin mengajak kepada semua lapisan masyarakat Desa Tenggulunan untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang dilakukan Pemdes demi kemaiuan kita hersama " tuturnya (Lie/Khol)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT





Pembangunan Pavingisasi Halaman desa Kepadangan.

# Untuk Pecantik Halaman, Balai Desa Kepadangan Bangun Jalan Paving Block

**Sidoarjo, Pojok Kiri**

Pemerintah Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan, realisasikan anggaran Pemerintah. Salah satunya, pemasangan paving block di halaman balai desa setempat.

Kades Kepadangan, Samsul Anam mengatakan, pemasangan paving block di halaman balai desa sangat diperlukan guna mempermudah masyarakat dan meningkatkan pelayanan.

“Dalam melaksanakan pembangunan tak lepas dari peran serta masyarakat, maka program pemberdayaan kerap dilakukan, guna menambah pendapatan, sehingga ada rasa memiliki dengan mempekerjakan warga setempat,” katanya, Selasa (28/05/2024).

Kades Anam menjelaskan, anggaran yang bersumber dari Pemerintah, sangat berpengaruh pada pembangunan desa, maka perlu secepatnya dibagikan setelah pihak desa mengajukan. “Begitu anggaran cair, langsung dialokasikan sesuai peruntukannya salah satunya pemasangan paving block di halaman balai desa,” jelasnya.

Masih dikatakan Anam, dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan desa sangat diperlukan sinergitas yang baik dari seluruh pihak, antara lain perangkat dan lembaga desa. “Sebagai Kepala

lain perangkat dan lembaga desa. Sebagai Kepala  
Desa, tentu membutuhkan saran yang membangun  
demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,”  
ujarnya. (dy/khol)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## PPS Resmi Dilantik Songsong Pilkada 2024

### Sidoarjo, Pojok Kiri

KPU Sidoarjo siapkan Pilkada 2024 dengan melantik dan mengambil sumpah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Minggu (26/5) di Mal Pelayanan Publik Sidoarjo. Pelantikan PPS tersebut saksikan langsung oleh Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., M.Kn.

"Setelah dilantik anggota PPS segera berkoordinasi dengan kepala desa/ lurah se-

tempat. Segera koordinasikan dengan baik fasilitas apa saja yang dapat digunakan oleh PPS dalam melaksanakan tugas," jelas Subandi pada saat memberikan sambutan pelantikan PPS Sidoarjo.

Menurut Subandi, PPS ini wajib melaksanakan semua tahapan pemilu, mulai dari Tingkat kelurahan / desa. Pada saat mengumpulkan dan menghitung surat suara harus teliti dan hati-

hati. Karena pada tahap ini rawan terjadi pelanggaran.

"Tugas PPS cukup berat selain sebagai ujung tombak pemilu, juga memegang Amanah dari seluruh masyarakat sidoarjo untuk suksesnya Pemilu 2024," sambungnya.

Ketua KPU Sidoarjo, Muhammad Iskak, mengatakan bahwa anggota PPS yang baru dilantik telah melalui proses seleksi yang Panjang.

Hasilnya terpilih 1.038 anggota PPS dari 18 kecamatan se-kabupaten Sidoarjo.

"Perlu saya ingatkan, menjadi penyelenggara pemilu sangat berat, karena harus bisa menjaga jarak, maksudnya kedekatan secara sosial dengan para kontestan, tidak memihak," tegasnya.

Iskak juga menegaskan, bahwa anggota PPS yang baru dilantik ini juga akan

kehilangan satu hak, yakni hak bersuara di publik, karena PPS memang harus netral. Semua kontestan pemilu harus diperlakukan sama oleh PPS.

"Mari kita bekerjasama dan berkomitmen dalam menyukseskan terlaksananya Pilkada tahun 2024. Dan kami mohon untuk pemerintah daerah memfasilitasi kerja PPS hingga ketingkat desa," jelasnya. (Khol/Dy)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT



# **Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

**Perda Kabupaten Sidoarjo No 10 Tahun 2013 Ditekankan dalam Kegiatan Sosialisasi TMMD Ke-120**

**Sidoarjo, Pojok Kiri**

Dalam upaya memperkokoh ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi yang menekankan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Program TMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo di Balai Desa Penambangan Kee, Balongbendo Kab. Sidoarjo, Selasa, 28 Mei 2024.

Acara sosialisasi ini menyoroti peran penting Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kapten Inf. Hendro Danramil 0816/10 Balongbendo turut memperkuat arahan tersebut dengan penekanan pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat.

Bapak Edi Sulaksono dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turut memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi Perda tersebut berdampak pada kebersihan lingkungan, sebagai bagian integral dari menciptakan ketertiban umum. Selain itu, AKP Drs. Samsudin dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai kepala penyuluh Nar, menyampaikan pentingnya peran bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba demi menjaga ketentraman masyarakat.

"Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman kita akan

peraturan-peraturan yang telah ada, khususnya Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat bersinergi dengan aparat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua," ungkap Kapten Inf Hendro.

Acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan aparat terkait dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus merangsang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan daerah. (\*)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT

## KOMUNITAS BOLONE MAK MIMIK RAMAIKAN UMKM GADING FAJAR

Sidoarjo, Pojok Kiri

H. Mimik Idayana anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Gerindra juga sebagai Cawabup yang berpasangan dengan H. Subandi Sabtu Sore (25/5) menyapa Emak-Emak dalam acara ngopi bareng duduk bersama yang tergabung di dalam Komunitas Bolone Mak Mimik di daerah Gading Fajar II.

Dalam acara ngopi bareng tersebut H. Mimik Idayana banyak sekali menerima keluhan dari mereka terkait pemberdayaan Perempuan salah satunya ialah UMKM, komunitas Bolone Mak Mimik ini merupakan binaannya yang nantinya jika ia terpilih menjadi Kepala Daerah akan memperjuangkan para UMKM lewat pemerintah karena program pemberdayaan tersebut memang benar-benar sangat memberikan manfaat.

Dalam keterangannya H. Mimik mengungkapkan, giat pada Sore ini saya cuma ingin meramaikan UMKMnya Boy yang berjualan di daerah gading fajar, karena UMKM tersebut salah satu UMKM binaan." Alhamdulillah giat saya pada Sore ini disambut oleh simpatian saya yang tergabung dalam komunitas Bolone Mak Mimik, selain duduk bersama,



ngopi bersama saling mengenalkan produk olahan mereka, menyerap aspirasi mereka, Ternyata banyak keluhan dari mereka yang diutarakan kepada saya terkait UMKM," ungkapnya.

"Saya selaku tokoh perempuan di Sidoarjo akan terus berinspirasi terhadap emak-emak, karena Un-

tuk menuju Sidoarjo yang Mandiri dan Sejahtera harus bisa mewujudkan Peningkatan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dengan arah kebijakan di antaranya Memperkuat usaha-usaha yang berbasis kerakyatan sebagai penopang dasar kekuatan perekonomian daerah dan Penguatan ka-

pasitas dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat perekonomian," ujarnya.

"Agar Penguatan kapasitas dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat perekonomian agar dapat bersaing di pasar nasional kita akan melakukan pendekatan secara masif seperti pelatihan, mereka

akan mendapatkan materi pendampingan seputar UMKM yang meliputi mindset usaha, legalitas Usaha, manajemen Usaha, harga pokok penjualan hingga pasaran, mereka akan di tempa dan di bimbing, agar menjadi pengusaha sukses dan berkualitas," pungkasnya. (Nang)

**POJOK KIRI**  
KORAN RAKYAT

## Pt Bupati Subandi Gandeng Nasyiatul Aisyiyah Bangun Sidoarjo

KOTA-Pt. Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn. menghadiri pengukuhan PC Nasyiatul Aisyiyah se-kabupaten Sidoarjo dan Konsolidasi Daerah, Minggu (26/5) di kompleks Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

PC Nasyiatul Aisyiyah adalah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan kemasyarakatan dan keputrian. Dia menilai organisasi tersebut berpotensi untuk menjadi salah satu penggerak dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami sangat menyambut baik dengan hadirnya organisasi-organisasi semacam ini. Apalagi di bawah naungan para ulama dan umaro, akan menjadikan kekuatan bagi Pemkab Sidoarjo dalam memperkokoh sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara," ucapnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Muhammadiyah yang telah menjadi support sistem yang baik dan telah melebur bersama pemerintah dalam membangun di Kabupaten Sidoarjo. Turut mewu-



SINERGI: Pt Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri pengukuhan PC Nasyiatul Aisyiyah se-Sidoarjo.

judkan Kabupaten Sidoarjo yang baldatun toiyabatun.

"Saya senang dan bangga berkesempatan hadir pada moment yang luar biasa. Di sini saya bisa mendengarkan gagasan, program

serta peran serta dalam penurunan stunting dan merdeka sampah. Pemerintah daerah akan memberikan support terbaik agar program-program ini bisa berjalan," tambahnya

Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terutama mengenai masalah pendidikan dan kesehatan. Dia memastikan akan terus dikawal.



KOMPAS: Subandi memastikan akan merangkul dan memberikan support terbaik.

Sehingga masyarakat bermanfaat untuk masyarakat. "Jangan sampai pelayanan yang kami berikan memberatkan dan terjadi pungutan liar di masyarakat," ujar Subandim

Sementara itu Ketua PDNA Sidoarjo Ayunda Nur Ravita Hanum, SE, MA menjelaskan, Nasyiatul Aisyiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah

yang lahir pada 16 Mei 1931. Memiliki kader-kader yang masih sangat muda yaitu dari usia 17 hingga 40 tahun. Fokus pada isu-isu perempuan dan anak.

"Kami juga menyediakan daycare, aktif dalam program penurunan stunting juga dalam program merdeka sampah, jelasnya. (nls/vga)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## KPU Umumkan Pemenang Lomba Maskot dan Jingle Hari Ini

KOTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak semakin dekat. KPU Sidoarjo sudah melakukan persiapan untuk menyukseskan gelaran lima tahunan tersebut.

Mulai dari pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pemungutan Suara (PPS). Hingga lomba pembuatan maskot dan jingle yang dibuka secara umum.

Lomba maskot dan jingle merupakan langkah strategis KPU Sidoarjo, guna menyema-

rakkan Pilkada 2024. KPU Sidoarjo juga membuka lomba tersebut untuk semua. Sehingga semua kalangan baik dari pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat dapat ikut serta.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak mengatakan, sudah menerima banyak berkas pendaftaran dari peserta lomba maskot dan jingle. Karena itu pihaknya akan segera umumkan siapa pemenangnya.

"Peserta yang mengumpulkan maskot dan jingle sudah banyak, kita akan umumkan

sesuai dengan jadwal yaitu 29 Mei," ucapnya pada Radar Sidoarjo, Selasa, 28 Mei 2024.

Iskak menegaskan, tidak akan memberi waktu tambahan bagi peserta untuk mengumpulkan berkas lomba. Semua sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

"Tidak ada penambahan hari lagi untuk pengumpulan (nerkas peserta lomba maskot dan jingle, Red)," tegasnya.

Terkait pemilihan pemenang, Iskak menyerahkan sepenuhnya ke tim juri.

Karena mereka yang lebih tahu bagus tidaknya karya dari peserta.

Kendati demikian, terdapat kriteria dari KPU Sidoarjo yang harus dipenuhi dalam karya peserta. Salah satunya memuat soal ciri khas Kabupaten Sidoarjo.

"Kisi-kisinya ada muatan kedaerahannya, kemudian ikon-ikon yang harus diangkat di Kabupaten Sidoarjo," katanya. "Tunggu saja, akan kami umumkan," pungkasnya. (sal/nis)



M Iskak



## Satlantas Polresta Sidoarjo Bagi-bagi Paket Sembako



Sidoarjo,

Memorandum

Peduli pada masyarakat, terutama bagi pengendara yang tertib berlalu lintas, dilakukan personel Satlantas Polresta Sidoarjo, Selasa (28/5) pagi. Polantas (Polisi Lalu Lintas) pagi itu membagikan 78 paket sembako.

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78, 1 Juli 2024. Kasubnit III Regident Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Moneta Lestari, pembagian 78 paket sembako ini dalam rangka mengisi kegiatan peringatan Hari Bhayangkara.

"Berkelanjutan, nantinya akan ada banyak kegiatan menarik yang akan diselenggarakan Polresta Sidoarjo guna memeriahkan Hari Bha-



Polantas Sidoarjo berbagi sembako.

yangkara ke-78. Harapannya Polri dapat semakin dekat dengan masyarakat," ujar Iptu Moneta Lestari.

Pembagian sembako kali ini ditujukan kepada masyarakat,

pedagang maupun pengendara yang tertib berlalu lintas di sekitar Mapolresta Sidoarjo.

"Bersamaan pembagian sembako ini, kami bersama

para personel Satlantas Polresta Sidoarjo juga mengedukasi masyarakat untuk turut mematuhi peraturan tertib berlalu-lintas, tandasnya. (im/jok/day)

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Satgas TMMMD Ke-120 Sidoarjo Beri Bantuan Benih Padi

### Sidoarjo, Memorandum

Meningkatkan sektor pertanian di Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Satgas TMMMD ke-120 Kodim 0816/Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan benih padi kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) setempat. Bantuan itu diserahkan di pendopo kecamatan, Selasa (28/5).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pertanian lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Bantuan benih padi diserahkan Bati Ter TMMMD Kodim 0816/Sidoarjo Pelda Sutrisno.

"Saya ingin menyampaikan pesan bahwa benih padi ini adalah amanah yang perlu dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah dengan bijak dan laksanakanlah dengan penuh dedikasi agar kita dapat meraih hasil yang optimal," ujarnya.

Dikatakan, bantuan ini hii-



Penyerahan bantuan benih padi dari Satgas TMMMD Sidoarjo kepada perwakilan gapoktan.

kan hanya sekadar sumbangan, namun merupakan bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Ketua Gapoktan Desa Penambangan, Ahmad, mengapresiasi Satgas TMMMD dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan dukungan kepada petani di desanya.

Dansatgas TMMMD Kodim

0816/Sidoarjo Letkol Inf Guntung Dwi Prasetyo mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam membantu pembangunan di pedesaan. "Kami berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi para petani dan masyarakat setempat serta turut mendukung program ketahanan pangan nasional," katanya (sho/ink/ene)

**MEMORANDUM**  
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



# Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan di Sidoarjo 2023



IA/juru muda	: -	IIIB/penata muda tingkat I	: 1.820
IB/juru muda tingkat I	: -	IIIC/penata	: 920
IC/juru	: 10	IIID/penata tingkat I	: 1.489
ID/juru tingkat I	: 125	IVA/pembina	: 740
IIA/pengatur muda	: 86	IVB/pembina tingkat I	: 681
IIIB/pengatur muda tingkat I	: 226	IVC/pembina utama muda	: 112
IIIC/pengatur	: 615	IVD/pembina utama madya	: 11
IIID/pengatur tingkat I	: 888	IVE/pembina utama	: 8
IIIA/penata muda	: 573		

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

GRAFIS: RIZKY/JAWA POS

**TOTAL** ada 9.304 PNS di Sidoarjo. Paling banyak golongan pangkat IIIB atau penata muda tingkat I. (uzi/c7/any)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Jalan KH Ali Mas'ud Akhirnya Diperbaiki

**SIDOARJO** – Jalan KH Ali Mas'ud di Kecamatan Buduran yang sebelumnya berlubang akhirnya diperbaiki Satgas Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo kemarin (28/5).

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, perbaikan dilakukan satgas jalan karena tingkat kerusakannya kecil. Apalagi, pada Februari lalu ruas jalan tersebut juga sudah diperbaiki. "Hari ini (kemarin, Red) hanya penambalan di titik yang berlubang," jelasnya. Pelaksanaan perbaikan juga tidak sampai menutup jalan. "Tuntas dalam sehari," ujarnya.

Jalan tersebut beberapa kali berlubang. Titiknya berbeda. Dwi menyebut faktor utamanya adalah tidak adanya drainase sehingga air hujan mengantong di jalan. Selain itu, banyak kendaraan berat yang melintas. "Sudah direncanakan untuk dibangun drainase," katanya.

Selain di Jalan KH Ali Mas'ud, tim satgas jalan melakukan perbaikan di titik lain yang tingkat kerusakannya tidak parah. Di antaranya, Jalan Kedungsolo, Kecamatan Krembung; jalan di sebelah kantor Kecamatan Krian; Jalan Masjid Keboananom, Gedangan; dan ruas Jalan



DITE SURENDRA/JAWA POS

**TAMBAL SULAM:** Pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo menambal Jalan Ali Mas'ud yang sering berlubang kemarin.

# Jawa Pos

## Hari Pertama Verifikasi Offline, Calon Siswa Membeludak

SIDOARJO – Kemarin (28/5) menjadi hari pertama verifikasi berkas penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN-SMKN dan pengambilan PIN (*personal identification number*) untuk pendaftaran. Calon siswa yang datang ke sekolah membeludak.

Kepala SMAN 1 Sidoarjo Eko Redjo Sunariyanto mengatakan, kemarin calon siswa mulai melakukan verifikasi berkas secara langsung ke sekolah. Hari sebelumnya, mereka telah mengajukan PIN secara *online* dan mengunggah dokumen. Setelah itu, mereka mendapat pemberitahuan untuk verifikasi secara *offline* di lima sekolah yang ditentukan.

Mereka bisa memilih satu di antara lima sekolah yang sudah diinformasikan ke



DITE SURENDRA/JAWA POS

ANTUSIAS: Brillian Narendra dari SMPN 6 didampingi ibunya, Ika Puji, saat verifikasi PPDB di SMAN 1 Sidoarjo kemarin.

calon siswa. Lokasi lima sekolah itu paling dekat dengan rumah calon siswa. Tampaknya, banyak yang

melakukan verifikasi pada hari pertama kemarin. SMAN 1 Sidoarjo menjadi salah satu sekolah yang diserbu calon

siswa. "Kami sudah siapkan pengaturannya, ada nomor antrean. Kami siapkan lima ruangan sebagai ruang

tunggu," kata Eko.

Verifikasi tersebut dilakukan di aula. Meskipun membeludak, verifikasi berlangsung kondusif. Pihaknya juga menyampaikan ke calon siswa bahwa verifikasi bisa dilakukan di sekolah lain. Selain itu, masa verifikasi di sekolah akan berlangsung hingga 15 Juni mendatang. Jadi, masih ada beberapa hari sebagai antisipasi agar tidak membeludak.

Di SMAN 2 Sidoarjo tak jauh berbeda. Kepala SMAN 2 Sidoarjo Ristiwi Peni mengatakan, ada sekitar 500 calon siswa yang hadir. Para siswa berdatangan sejak Senin (27/5) untuk tanya-tanya di sekolah. "Hari sebelumnya ada 70-an anak. Cari informasi di sekolah. Untuk verifikasi ini, kami menyiapkan 10 ruangan," katanya. (uzi/c18/any)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## Central Berita

Menyajikan Berita-Berita Fakta dan Aktual Setiap Hari



CENTRAL BERITA NEWS > Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 Ditekankan dalam Kegiatan Sosialisasi TMMD Ke-120, Menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

📅 28 Mei 2024 | 📍 Breaking News, Daerah |

👤 PARMAN PARMAN CB | 💬 Leave a comment



Sidoarjo, Cenrralberitanews.com – Dalam upaya memperkokoh ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi yang menekankan implementasi Peraturan

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Program TMMD ke-120 0816/Sidoarjo di B **Pengaduan via WhatsApp?** Balongbendo Kab. Sidoarjo. Selasa, 28 Mei 2024.



Acara sosialisasi ini menyoroti peran penting Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013 dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kapten Inf. Hendro Danramil 0816/10 Balongbendo turut memperkuat arahan tersebut dengan penekanan pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat.



Bapak Edi Sulaksono dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) turut memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi Perda tersebut berdampak pada kebersihan lingkungan, sebagai bagian integral dari menciptakan ketertiban umum. Selain itu, AKP Drs. Samsudin dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai kepala penyuluh Nar, menyampaikan pentingnya peran bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba demi menjaga ketentraman masyarakat.

“Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman kita akan peraturan-peraturan yang telah ada, khususnya Perda Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2013. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat bersinergi dengan aparat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua,” ungkap Kapten Inf Hendro.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan aparat terkait dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sekaligus merangsang partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan daerah.



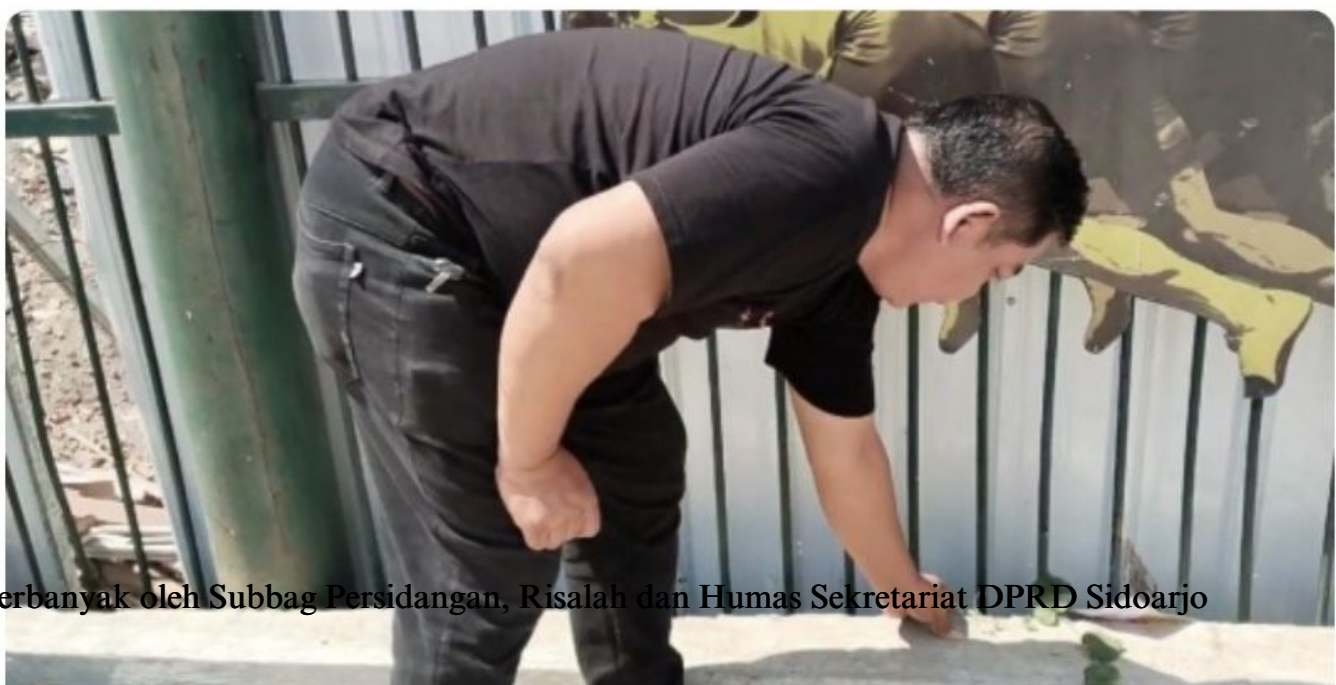
 RadarJatim.id



Home > Infrastruktur

## Proyek Revitalisasi Kawasan Gelora Delta Mangkarak, JCW Segera Lapor KPK

by Radar Jatim — 28 Mei 2024





Ketua JCW, Sigit Imam Basuki saat melihat langsung proyek revitalisasi kawasan Gelora Delta Sidoarjo tahun anggaran 2023 yang dibiarkan mangkrak.



**SIDOARJO (RadarJatim.id)** – Proyek revitalisasi kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo senilai sekitar Rp 16 Milyar untuk tahun anggaran 2023 terlihat belum selesai dikerjakan dan dibiarkan mangkrak oleh pihak kontraktor.







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Tiang-tiang lampu hias berwarna hitam dan kuning emas sudah terpasang ditempatnya, namun ada beberapa yang hilang dari tempatnya. Begitu juga dengan pohon *pule* yang ditanam sebagai pengganti pohon sono sudah terlihat banyak yang mati.

Lantai trotoar yang dipasang granit belum juga selesai, khususnya yang berada disekitar lampu hias berwarna hitam dan kuning emas.

Sigit Imam Basuki, Ketua Java Corruption Watch (JCW) mengatakan mangkraknya pembangunan revitalisasi kawasan Gelora Delta Sidoarjo itu disebabkan oleh longgarnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo, Selasa (28/05/2024).

Proyek revitalisasi kawasan Gelora Delta Sidoarjo tersebut memang dikerjakan oleh 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo. Dinas PU BMSDA Sidoarjo mengerjakan trotoar beserta saluran, sedangkan DLHK Sidoarjo mengerjakan lampu hias beserta taman.

“Mangkraknya proyek revitalisasi kawasan Gor (Gelora Delta Sidoarjo, red) disebabkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait,” katanya.



radarjatim.id



Main hole trotoar dikawasan Gelora Delta Sidoarjo yang pengerjaannya terkesan asal-asalan.

Untuk itu, ia meminta Dinas PU BMSDA dan DLHK Sidoarjo harus bertanggung jawab terhadap mangkraknya proyek revitalisasi kawasan Gelora Delta yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo 2023 tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan *blacklist* terhadap kontraktor karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah ditanda tangannya.

“Kontraktornya harus di blacklist, jangan sampai

mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten, red) Sidoarjo untuk tahun-tahun selanjutnya,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, lembaga yang konsen terhadap penegakan korupsi itu mengancam akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada dugaan proyek revitalisasi tersebut tidak sesuai dengan nilai kontrak.

🔒 radarjatim.id





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan nitung-nitungan JCV, proyek revitalisasi kawasan Gelora Delta Sidoarjo itu tidak sampai menelan anggaran sampai Rp 16 Milyar karena dilapangan terindikasi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta speknya.

“Karena itu, kami akan segera membuat laporan ke KPK terkait proyek revitalisasi kawasan Gor ini,” tegasnya. (mams)



## TP PKK Kabupaten Sidoarjo Sosialisasi Keluarga Indonesia Anti Kekerasan dan Pelecehan Seksual

28 Mei 2024 20:49 WIB - 89 Dilihat

oleh redaksi



Plt Ketua PKK Kabupaten Sidoarjo, dr Sriatun Subandi

**SIDOARJO, PETISI.CO** – TP PKK Kabupaten Sidoarjo turut berpartisipasi aktif menurunkan angka kekerasan Perempuan dan anak bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) dan Polresta Sidoarjo untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kader-kader PKK tentang Keluarga Indonesia anti kekerasan dan pelecehan seksual, Selasa (28/5/2024) di Pendopo Delta Wibawa.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Beranda

PERISTIWA

POLITIK

PETISI tv

e-PAPER

Plt Ketua PKK Kabupaten Sidoarjo, dr Sriatun Subandi memberikan apresiasi positif terhadap sosialisasi keluarga Indonesia anti kekerasan dan pelecehan seksual untuk kader PKK. Karena PKK itu kekuatan perempuan di tingkat dasar dalam membangun pondasi keluarga, melalui berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

“Semoga dengan kegiatan ini TP PKK akan terus bersinergi dengan Dinas P3AKB, Polresta Sidoarjo, terkait dengan penurunan kekerasan Perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Kita akan bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus KDRT maupun kekerasan seksual yang terjadi baik pada perempuan

...nakan bagi korban dan pelaku. Penguatan peran keluarga juga penting. Mengingat keluarga sebagai pondasi utama dalam menjaga dan melindungi dari perilaku kekerasan seksual.





“Jika sebuah keluarga memiliki ketahanan keluarga yang baik, maka dengan sendirinya akan tercipta tatanan sosial masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai yang sesuai dengan aturan norma agama. Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam memajukan dan mengokohkan bangsa dan negara,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan ketahanan keluarga yang kuat dan kokoh juga harus dibangun dengan aspek ketahanan spiritual, psikologis dan ketahanan sosial. Untuk TP PKK Kabupaten Sidoarjo yang membidangi bidang tersebut ada di Pokja I.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Pengurus TP PKK Kabupaten, perwakilan pengurus TP PKK Kecamatan, dan Kelurahan/ desa se-Kabupaten Sidoarjo. Narasumber Heni Kristiani, SPd,.M.Pd. Kepala Dinas P3AKB Kab Sidoarjo serta Utun Utami, SH. yang merupakan Kanit PPA Polresta Sidoarjo. *(guh)*